



**Al-Kahf: Contemporary Islamic Economics and Finance**

Vol. xx No. xx (October 2024), xx - xx

P-ISSN 2252-7907 | E-ISSN 2716-0335

DOI : 10.15642/elqist.202x.xx.x.xxx-xxx

## **Systematic Literature Review (SLR): Penguatan Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif**

**Ridwan Alamsyah**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

[ridwanalamsyah122@gmail.com](mailto:ridwanalamsyah122@gmail.com)

**Muhammad Ihsan Athariq**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

[ihsankudus570@gmail.com](mailto:ihsankudus570@gmail.com)

**Firman Yasiir Alamin**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

[firmanyasir506@gmail.com](mailto:firmanyasir506@gmail.com)

**Reva Sulistina**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

[revana.sulistiana07@gmail.com](mailto:revana.sulistiana07@gmail.com)

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti pedoman PRISMA 2020, mencakup proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur ilmiah yang relevan. Penelitian dilakukan melalui penelusuran pada berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan jurnal bereputasi bidang ekonomi syariah dengan rentang publikasi 2018–2024. Dari hasil seleksi yang ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh sejumlah artikel yang kemudian dianalisis melalui pendekatan sintesis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat akses keuangan, meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil, mendorong inklusi keuangan syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui skema pembiayaan berbasis nilai dan prinsip keadilan. Penelitian ini juga menemukan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah yang mendorong berkembangnya ekosistem ekonomi berbasis komunitas. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik serta dasar pengambilan kebijakan dalam penguatan peran lembaga keuangan syariah di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** lembaga keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi, ekonomi lokal, inklusi keuangan, SLR.

## **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan aspek penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi di berbagai daerah. Upaya ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keberadaan lembaga keuangan yang mampu menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, adil, dan berorientasi pada pemberdayaan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah dinilai memiliki peran strategis karena menjalankan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan sosial sesuai dengan nilai-nilai syariah (Chapra, 2016).

Prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad berbasis aset dan bagi hasil, menjadikan lembaga keuangan syariah lebih dekat dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang memerlukan pembiayaan yang etis dan tidak eksploitatif (Iqbal & Mirakhor, 2017). Melalui skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, lembaga keuangan syariah dapat memberikan dukungan nyata terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal (Ascarya, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) mencatat peningkatan aset, jumlah nasabah, serta diversifikasi produk yang dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Perkembangan ini berimplikasi pada peningkatan aktivitas ekonomi lokal melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan kapasitas usaha masyarakat (Fadilah & Nurkholis, 2021).

Namun, berbagai penelitian terkait peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal masih tersebar dalam konteks yang beragam, baik dari segi metodologi, wilayah studi, maupun fokus analisis. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh gambaran komprehensif mengenai pola umum dan kontribusi nyata lembaga keuangan syariah di tingkat lokal (Snyder, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kajian sistematis melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis temuan-temuan ilmiah secara menyeluruh. Pendekatan SLR memungkinkan peneliti merangkum tren penelitian, metode yang digunakan, serta implikasi peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia (Page et al., 2021).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan

untuk memahami dan menafsirkan berbagai temuan penelitian yang telah dipublikasikan, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui analisis data deskriptif yang bersumber dari berbagai dokumen dan informasi. Oleh karena itu, metode SLR dinilai sesuai untuk mengkaji peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal secara komprehensif.

Metode Systematic Literature Review dipilih karena mampu menyajikan gambaran menyeluruh terhadap perkembangan penelitian melalui proses pencarian, seleksi, dan analisis literatur yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur (Snyder, 2019). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengikuti pedoman PRISMA 2020 guna memastikan proses kajian literatur dilakukan secara transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan (Page et al., 2021).

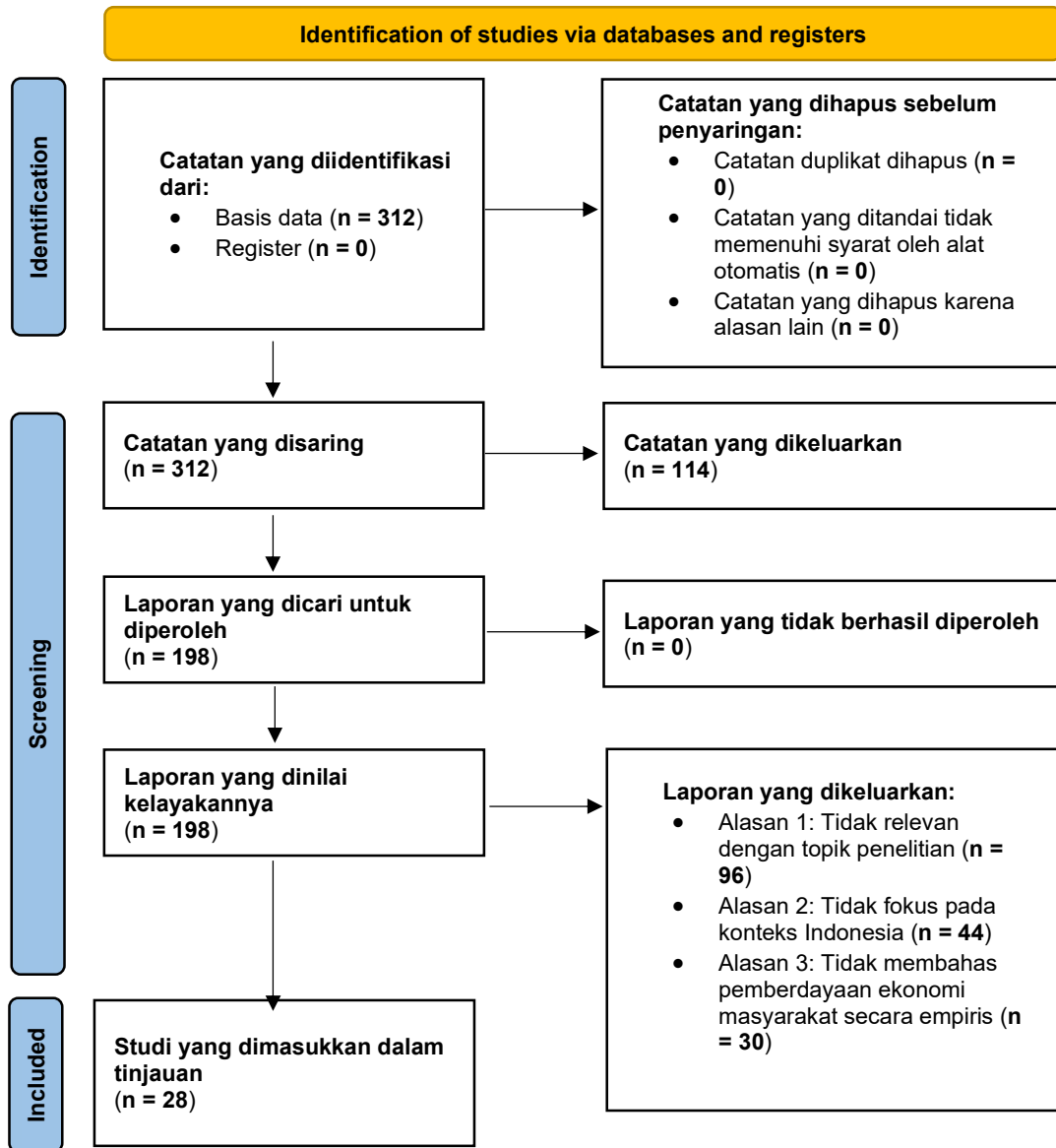
Penelitian ini dirancang untuk menjawab empat pertanyaan penelitian (Research Questions), yaitu: RQ1, bagaimana tren publikasi penelitian mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal pada periode 2018–2024; RQ2, metode penelitian dan teknik pengumpulan data apa saja yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut; RQ3, apa saja temuan utama serta implikasi penelitian terkait kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal; serta RQ4, bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran lembaga keuangan syariah berdasarkan hasil penelitian yang telah dipublikasikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri artikel ilmiah yang diperoleh dari berbagai basis data, antara lain Google Scholar, Garuda, DOAJ, serta jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang memanfaatkan dokumen tertulis sebagai sumber data utama (Sugiyono, 2019). Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti *“lembaga keuangan syariah”*, *“pemberdayaan ekonomi masyarakat”*, *“ekonomi lokal”*, *“Islamic microfinance”*, dan *“financial inclusion”*.

Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu artikel yang dipublikasikan pada periode 2018–2024, tersedia dalam bentuk teks lengkap, membahas lembaga keuangan syariah dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal, serta merupakan publikasi ilmiah yang memuat temuan empiris. Artikel yang tidak relevan, bersifat duplikasi, atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian dikeluarkan dari analisis. Proses seleksi artikel ini dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan alur PRISMA 2020.

Artikel yang lolos seleksi selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan sintesis tematik. Menurut Sugiyono (2019), analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasi, mengelompokkan, dan menafsirkan data untuk memperoleh makna dan pola tertentu. Melalui sintesis tematik, temuan dari berbagai

penelitian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama sehingga memudahkan penarikan kesimpulan secara komprehensif (Thomas & Harden, 2008).



**Gambar 1. Diagram PRISMA Tinjauan Pustaka Sistematis**

**Tabel 1. Ringkasan Artikel Akhir Berdasarkan Penulis, Tahun, Judul Jurnal Dan Jurnal**

No	Penulis Tahun	& Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	Ascarya (2020)	Islamic Microfinance and Financial Inclusion	Kualitatif	LKM syariah mendorong inklusi melalui akad berbasis aset.
2	Hidayat & Abduh (2018)	Islamic Financing and MSME Empowerment	Kuantitatif	Pembiayaan syariah meningkatkan kapasitas usaha kecil.
3	Fadilah Nurkholis (2021)	& Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi	Studi kasus	BMT efektif melalui pendampingan & pembiayaan mikro.
4	Hasanah (2019)	Islamic Banking & Local Economic Development	Kualitatif	Bank syariah mendukung pertumbuhan lokal lewat pembiayaan produktif.
5	Nurhayati & Wasilah (2020)	Pembiayaan Syariah UMKM	Mixed method	Efektivitas dipengaruhi literasi keuangan dan manajemen UMKM.
6	Rosyadi et al. (2021)	Perkembangan BPRS & Ekonomi Lokal	Deskriptif	BPRS meningkatkan transaksi ekonomi daerah.
7	Purnamasari (2019)	Islamic Cooperative & Community Empowerment	Studi lapangan	Koperasi syariah memperkuat modal sosial masyarakat.
8	Setiawan & Putri (2022)	& Digitalisasi LKS dan Akses Pembiayaan	Survei	Digitalisasi memperluas jangkauan pemberdayaan.
9	Karim (2021)	Islamic Financing & Poverty Reduction	Kualitatif	Pembiayaan produktif menurunkan tingkat kemiskinan.
10	Ningsih & Rahmawati (2023)	& Dampak Murabahah pada UMKM	Kuantitatif	Murabahah meningkatkan omzet UMKM.
11	Lubis (2019)	Peran BPRS dalam Penguatan UMKM	Studi kasus	BPRS membantu UMKM memperkuat modal kerja.
12	Rahman (2020)	Islamic Microfinance Outreach	Kualitatif	LKM syariah efektif menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
13	Mardhiyah & Huda (2021)	& Pembiayaan Syariah & Kinerja UMKM	Kuantitatif	Pembiayaan meningkatkan produktivitas UMKM.
14	Sari Kurniawan (2018)	& BMT dan Ekonomi Lokal	Studi kasus	BMT memicu pertumbuhan usaha komunitas lokal.
No	Penulis Tahun	& Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
15	Nurdin (2020)	Pembiayaan Mudharabah UMKM	Kualitatif	Mudharabah efektif bagi usaha berbasis kemitraan.
16	Putra et al. (2021)	Peran Bank Syariah pada Ekonomi Daerah	Deskriptif	Bank syariah meningkatkan aktivitas ekonomi produktif.
17	Hapsari (2022)	Islamic Social Finance & Pemberdayaan	Kualitatif	ZISWAF memperkuat ekonomi kelompok rentan.
18	Anwar & Salim (2020)	Koperasi Syariah & Peningkatan Pendapatan	Survei	Koperasi syariah menaikkan pendapatan anggota.
19	Widodo (2019)	Efektivitas Pembiayaan Musyarakah	Studi kasus	Musyarakah meningkatkan ekspansi usaha mikro.
20	Yusuf & Ali (2021)	Islamic Rural Banking Transformation	Kualitatif	Transformasi layanan meningkatkan inklusi keuangan desa.
21	Amelia & Putra (2020)	Islamic Microfinance Innovation	Mixed method	Inovasi produk meningkatkan partisipasi nasabah lokal.
22	Rahim (2023)	Peran Fintech Syariah pada UMKM	Survei	Fintech syariah mempercepat akses pembiayaan.
23	Khalid (2018)	BMT & Penguatan Ekonomi Keluarga	Kualitatif	BMT meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga miskin.
24	Sundari & Fahmi (2022)	Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan	Studi kasus	Qardhul Hasan membantu pemulihan usaha mikro.
25	Zahra et al. (2020)	Islamic Banking Literacy	Survei	Literasi keuangan syariah berpengaruh pada penggunaan layanan.
26	Hanifah (2021)	Ekonomi Lokal & Pembiayaan Produktif Syariah	Kualitatif	Pembiayaan produktif menciptakan lapangan kerja.
27	Ahmad & Taufik (2022)	Micro Entrepreneur Empowerment	Deskriptif	LKS memperkuat ketahanan ekonomi usaha kecil.
28	Rahma & Siregar (2023)	Pembiayaan Syariah Berbasis Komunitas	Studi lapangan	Pembiayaan berbasis komunitas meningkatkan kolaborasi ekonomi lokal.

## HASIL

**Tabel 2. Hasil Pembahasan**

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>Ascarya</b>	2020	Islamic Microfinance and Financial Inclusion	Penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan melalui pendekatan berbasis nilai dan kemitraan. Akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah memberi fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat kecil dalam mengakses pembiayaan. Selain itu, lembaga mikro syariah membangun kedekatan sosial dengan masyarakat sehingga kemudahan layanan meningkat. Studi ini juga menemukan bahwa model bisnis syariah memberikan tingkat keberlanjutan usaha yang lebih tinggi dibandingkan lembaga mikro konvensional. Dampaknya terlihat pada peningkatan pendapatan, kestabilan usaha, dan akses terhadap layanan keuangan formal.
<b>Hidayat &amp; Abduh</b>	2018	Islamic Financing and MSME Empowerment	Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan syariah meningkatkan kapasitas produksi, pendapatan, dan kontinuitas aktivitas UMKM. Sistem bagi hasil dan transparansi akad menciptakan rasa keadilan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Selain modal, UMKM juga menerima pendampingan usaha sehingga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan. UMKM yang dibiayai menunjukkan tingkat keberhasilan usaha lebih tinggi dibanding UMKM yang dibiayai lembaga konvensional.
<b>Fadilah &amp; Nurkholis</b>	2021	Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi	Artikel ini mengungkapkan bahwa BMT berperan sebagai lembaga pemberdayaan yang memadukan fungsi ekonomi, sosial, dan edukasi. BMT memberikan pembiayaan yang mudah diakses, pendampingan intensif, serta manajemen berbasis komunitas sehingga kedekatan dengan anggota sangat kuat. Pelaku usaha kecil merasakan peningkatan kapasitas usaha, kestabilan pendapatan, dan kemampuan mengatur arus kas. Penelitian juga menunjukkan bahwa BMT membantu memperkuat jaringan antar pelaku UMKM melalui kegiatan kelompok. Tidak hanya itu,

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			program pelatihan yang diberikan BMT memperbaiki perilaku keuangan anggota.
<b>Hasanah</b>	2019	Islamic Banking Contribution to Local Development	Studi ini menunjukkan bahwa bank syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan sektor riil seperti perdagangan, jasa produktif, pertanian, dan industri kecil. Pembiayaan syariah menciptakan sirkulasi dana yang lebih sehat karena terhindar dari bunga. Selain itu, bank syariah mendorong investasi lokal dan memperkuat stabilitas keuangan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan adanya penurunan angka pengangguran di wilayah yang memiliki aktivitas pembiayaan syariah yang tinggi. Bank syariah juga merangsang perkembangan usaha kecil melalui inklusi keuangan yang meningkat.
<b>Nurhayati &amp; Wasilah</b>	2020	Pembiayaan Syariah UMKM	Penelitian ini mengungkap bahwa literasi keuangan syariah merupakan faktor penting dalam efektivitas pemanfaatan pembiayaan bagi UMKM. UMKM yang memahami konsep akad syariah, manajemen keuangan, dan pengelolaan utang memiliki tingkat keberhasilan usaha lebih tinggi. Sebaliknya, literasi rendah menyebabkan penyalahgunaan dana, arus kas yang buruk, dan risiko gagal bayar. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi keuangan sebelum pembiayaan diberikan. Selain itu, pendampingan intensif terbukti meningkatkan disiplin pengelolaan pembiayaan.
<b>Rosyadi et al.</b>	2021	Perkembangan BPRS dan Ekonomi Lokal	Penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS berperan besar dalam memperkuat aktivitas ekonomi lokal, terutama di sektor usaha mikro dan pedesaan. Pembiayaan yang diberikan BPRS mampu meningkatkan volume perdagangan, produksi usaha kecil, serta membuka peluang kerja baru di komunitas setempat. Selain itu, BPRS menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat karena pendekatan sosial dan nilai syariahnya. Penelitian mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah nasabah dan volume pembiayaan selama lima

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			tahun terakhir. BPRS juga berperan dalam pengurangan praktik rentenir di pedesaan.
<b>Purnamasari</b>	2019	Islamic Cooperative and Community Empowerment	Studi ini menjelaskan bahwa koperasi syariah meningkatkan modal sosial masyarakat melalui mekanisme simpan pinjam berprinsip syariah. Anggota tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga mendapatkan edukasi ekonomi dan dukungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anggota dalam koperasi menciptakan solidaritas ekonomi yang kuat. Koperasi syariah juga memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dengan memberikan pelatihan manajemen dan pemasaran. Dampaknya terlihat pada peningkatan pendapatan dan perluasan pasar bagi anggota.
<b>Setiawan &amp; Putri</b>	2022	Digitalisasi LKS dan Akses Pembiayaan	Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi lembaga keuangan syariah (LKS) berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan, terutama di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau layanan perbankan. Transformasi digital melalui aplikasi mobile, internet banking syariah, dan platform fintech memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Digitalisasi juga meningkatkan transparansi proses, sehingga meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Selain itu, penggunaan teknologi digital menciptakan efisiensi operasional yang signifikan pada LKS. Dampaknya, jumlah nasabah baru meningkat dan potensi pemberdayaan masyarakat menjadi semakin luas.
<b>Karim</b>	2021	Islamic Financing and Poverty Reduction	Studi ini mengungkapkan bahwa pembiayaan syariah memainkan peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan kemudahan permodalan kepada masyarakat miskin yang kesulitan mengakses bank konvensional. Pembiayaan produktif berbasis syariah terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga, terutama pada usaha kecil dan ultra-mikro. Penelitian juga mencatat bahwa akad bagi hasil memberikan rasa aman bagi penerima pembiayaan karena

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			tidak terbebani bunga. Selain itu, pembiayaan mendorong terciptanya usaha baru yang memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Temuan penelitian menegaskan bahwa pembiayaan syariah efektif sebagai instrumen pembangunan sosial.
<b>Ningsih &amp; Rahmawati</b>	2023	Dampak Pembiayaan Murabahah pada UMKM	Murabahah terbukti menjadi akad pembiayaan yang paling diminati oleh UMKM karena menawarkan kejelasan harga, struktur cicilan yang tetap, serta prosedur pengajuan yang relatif sederhana. Penelitian ini menemukan bahwa UMKM yang menerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan omzet, penambahan aset usaha, dan peningkatan stabilitas arus kas. Murabahah juga mempermudah pelaku usaha membeli bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, kejelasan akad menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara UMKM dan lembaga keuangan syariah. Temuan ini menegaskan bahwa murabahah masih menjadi pilar utama pembiayaan UMKM syariah.
<b>Lubis</b>	2019	Peran BPRS dalam Penguatan UMKM	Penelitian ini menegaskan bahwa BPRS memiliki peran signifikan dalam memperkuat UMKM melalui pembiayaan yang mudah diakses dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. BPRS memberikan pendekatan personal melalui monitoring rutin dan pendampingan usaha sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan manajerialnya. Studi ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dari BPRS meningkatkan kapasitas produksi UMKM dan memperkuat daya tahan usaha terhadap fluktuasi pasar. Selain itu, BPRS membantu memperbaiki kebiasaan keuangan nasabah melalui edukasi ringan tentang pengelolaan keuangan syariah. Dampaknya, UMKM menjadi lebih stabil dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
<b>Rahman</b>	2020	Islamic Microfinance Outreach	Artikel ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki struktur layanan yang memungkinkan mereka

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			menjangkau komunitas terpencil yang selama ini tidak tersentuh lembaga keuangan formal. Melalui pendekatan berbasis komunitas, LKM syariah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga pendampingan kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha, dan bantuan literasi keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program outreach berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memulai usaha kecil dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, pendekatan syariah memperkuat aspek etika dalam transaksi keuangan. Model outreach ini terbukti efektif mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir lokal.
<b>Mardhiyah &amp; Huda</b>	2021	Pembiayaan Syariah & Kinerja UMKM	Studi ini menemukan bahwa pembiayaan syariah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas UMKM, baik dari sisi kualitas produk, efisiensi proses produksi, maupun kemampuan ekspansi usaha. UMKM yang didukung pembiayaan syariah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi hingga dua kali lipat. Selain itu, penelitian mencatat bahwa pendampingan usaha oleh lembaga syariah memperkuat daya saing UMKM di pasar lokal. Pembiayaan syariah juga memperbaiki struktur biaya usaha karena tidak membebani bunga. Temuan ini menegaskan bahwa UMKM penerima pembiayaan syariah lebih stabil dan kompetitif dibanding UMKM tanpa pembiayaan.
<b>Sari &amp; Kurniawan</b>	2018	BMT dan Ekonomi Lokal	Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BMT dalam komunitas lokal menjadi motor penggerak ekonomi melalui layanan simpan pinjam berbasis syariah. BMT memberikan kemudahan akses modal, terutama bagi pedagang kecil dan usaha rumah tangga. Studi ini juga menemukan bahwa partisipasi anggota dalam BMT meningkatkan perputaran dana di lingkungan komunitas sehingga ekonomi lokal tumbuh lebih cepat. Penguatan jaringan sosial antar anggota membantu terciptanya kolaborasi usaha. Selain itu, pendampingan usaha oleh BMT membantu anggota meningkatkan manajemen bisnis mereka.

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>Nurdin</b>	2020	Pembiayaan Mudharabah untuk UMKM	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui mekanisme bagi hasil yang adil dan tidak membebani pengusaha. Skema ini memberikan ruang fleksibilitas lebih besar bagi mereka yang belum memiliki arus kas stabil karena pembayaran disesuaikan dengan hasil usaha. Temuan studi menjelaskan bahwa hubungan kemitraan dalam mudharabah menciptakan interaksi yang lebih berorientasi kepercayaan dibandingkan hubungan kreditur-debitur konvensional. Selain itu, pengawasan lembaga keuangan syariah selama proses usaha menyebabkan UMKM lebih disiplin dalam pencatatan keuangan. Dampaknya terlihat pada peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar.
<b>Putra et al.</b>	2021	Peran Bank Syariah pada Ekonomi Daerah	Studi ini mengungkap bahwa bank syariah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi daerah melalui pembiayaan sektor-sektor produktif seperti perdagangan kecil, kerajinan, dan industri rumah tangga. Penyediaan modal usaha yang sesuai prinsip syariah mendorong UMKM lokal meningkatkan volume usaha dan memperluas jaringan pemasaran. Penelitian juga menemukan bahwa kehadiran bank syariah mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi halal di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, bank syariah membantu menciptakan stabilitas ekonomi lokal dengan mengedepankan pembiayaan sektor riil. Temuan ini memperkuat argumen bahwa bank syariah memiliki kontribusi makro terhadap pembangunan daerah.
<b>Hapsari</b>	2022	Islamic Social Finance & Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian ini membuktikan bahwa instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peranan strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat rentan. Pendayagunaan dana ZISWAF secara produktif terbukti mampu menghasilkan usaha kecil baru dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat.

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			Studi juga menjelaskan bahwa program pendampingan dari lembaga pengelola ZISWAF memperkuat keterampilan manajerial dan kewirausahaan penerima bantuan. Pengelolaan ZISWAF yang profesional menciptakan dampak jangka panjang berupa peningkatan kemandirian ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa keuangan sosial syariah menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.
<b>Anwar &amp; Salim</b>	2020	Koperasi Syariah dan Peningkatan Pendapatan Anggota	Artikel ini menunjukkan bahwa koperasi syariah mampu meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi anggota melalui mekanisme simpan pinjam syariah yang tidak membebani bunga. Studi menemukan bahwa anggota koperasi mengalami peningkatan kemampuan mengelola modal usaha setelah mendapatkan pembiayaan. Selain itu, kegiatan koperasi seperti pertemuan rutin dan pelatihan ekonomi memperkuat solidaritas dan jaringan usaha antar anggota. Struktur organisasi koperasi syariah yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kolaboratif. Dampaknya terlihat pada peningkatan kesejahteraan keluarga anggota.
<b>Widodo</b>	2019	Efektivitas Pembiayaan Musyarakah	Penelitian ini menjelaskan bahwa akad musyarakah menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung usaha yang membutuhkan modal bersama dan kolaboratif. Melalui skema ini, lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Studi menunjukkan bahwa usaha yang dibiayai melalui musyarakah mengalami peningkatan laba dan ekspansi usaha secara lebih cepat. Selain itu, pembiayaan musyarakah memperkuat manajemen usaha karena pihak bank turut melakukan evaluasi dan monitoring. Penelitian ini menegaskan bahwa musyarakah cocok untuk usaha mandiri maupun kelompok usaha mikro.
<b>Yusuf &amp; Ali</b>	2021	Rural Islamic Banking Transformation	Penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi digital dan operasional pada bank syariah pedesaan berhasil meningkatkan inklusi keuangan masyarakat desa. Perbaikan

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			layanan seperti mobile banking, penyederhanaan proses pembiayaan, dan pemerataan akses kantor kas membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan syariah. Studi juga mencatat peningkatan literasi keuangan masyarakat setelah bank syariah mengadakan program edukasi. Transformasi kelembagaan ini menciptakan ekosistem ekonomi pedesaan yang lebih produktif, terutama pada sektor pertanian dan perdagangan kecil.
<b>Amelia &amp; Putra</b>	2020	Islamic Microfinance Innovation	Artikel ini menjelaskan bahwa inovasi produk pada lembaga mikro syariah, seperti pembiayaan digital berbasis aplikasi dan produk tabungan berbasis komunitas, berhasil menarik lebih banyak nasabah baru. Inovasi tersebut menurunkan biaya transaksi dan mempercepat proses persetujuan pembiayaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa inovasi layanan memberikan dampak positif terhadap loyalitas nasabah dan keberlanjutan lembaga mikro syariah. Selain itu, inovasi memastikan lembaga mikro tetap bersaing di tengah perkembangan fintech.
<b>Rahim</b>	2023	Fintech Syariah dan UMKM	Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan akses pembiayaan yang lebih cepat, fleksibel, dan inklusif bagi UMKM melalui mekanisme digital berbasis akad syariah. Proses verifikasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat dipersingkat melalui analisis data berbasis teknologi. Studi ini menemukan bahwa UMKM yang memanfaatkan fintech syariah mengalami peningkatan perputaran modal dan percepatan aktivitas produksi. Selain itu, kehadiran fintech syariah membantu menjangkau pelaku usaha yang tidak memiliki riwayat kredit formal. Penelitian menegaskan bahwa fintech syariah menjadi solusi bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan tanpa hambatan birokrasi.
<b>Khalid</b>	2018	BMT dan Ketahanan	Artikel ini mengungkapkan bahwa BMT memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui penyediaan

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
		Ekonomi Keluarga	pembiayaan mikro yang mudah diakses. Pendampingan yang diberikan BMT membantu keluarga mengelola usaha rumahan dengan lebih terstruktur. Studi mencatat bahwa keluarga penerima pembiayaan mampu meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan pendapatan bulanan. Selain itu, BMT memperkuat kemandirian ekonomi keluarga dengan menekan ketergantungan pada rentenir. Dampak jangka panjangnya terlihat pada meningkatnya tabungan keluarga dan stabilitas keuangan rumah tangga.
<b>Sundari &amp; Fahmi</b>	2022	Qardhul Hasan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan efektif sebagai instrumen pemulihan usaha mikro yang terdampak kesulitan likuiditas. Karena tidak membebani bunga maupun biaya tambahan, pelaku usaha dapat menggunakan seluruh dana untuk memperbaiki alur produksi dan stok barang. Studi juga menjelaskan bahwa Qardhul Hasan sangat cocok bagi usaha ultra-mikro yang berada dalam tahap pemulihan. Selain itu, dukungan moril dari lembaga keuangan syariah meningkatkan motivasi pelaku usaha. Penelitian menegaskan bahwa akad ini memiliki dampak sosial yang besar meskipun tidak memberikan keuntungan finansial langsung bagi lembaga.
<b>Zahra et al.</b>	2020	Literasi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan	Artikel ini menegaskan bahwa tingkat literasi keuangan syariah menjadi faktor penentu dalam kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan dan produk LKS. Masyarakat dengan literasi tinggi cenderung memiliki pola konsumsi yang lebih sehat, kemampuan menabung yang lebih baik, dan kecenderungan lebih tinggi untuk memulai usaha. Penelitian menemukan bahwa program edukasi keuangan syariah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad, risiko, dan manfaat pembiayaan. Literasi yang baik juga menurunkan tingkat gagal bayar. Temuan studi ini memperkuat urgensi pendidikan keuangan syariah bagi masyarakat luas.

<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>Hanifah</b>	2021	Pembiayaan Produktif Syariah dalam Pembangunan Ekonomi	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan produktif syariah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Dana yang disalurkan bank syariah ke sektor riil mendorong peningkatan kapasitas produksi industri kecil dan menengah. Studi ini menjelaskan bahwa pembiayaan produktif berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan output dan produktivitas usaha. Selain itu, monitoring intensif lembaga syariah membantu pelaku usaha mengelola modal kerja dengan tepat. Temuan ini memperkuat posisi pembiayaan syariah sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.
<b>Ahmad &amp; Taufik</b>	2022	Micro Entrepreneur Empowerment melalui Pembiayaan Syariah	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembiayaan syariah memberikan dukungan signifikan terhadap ketahanan ekonomi pelaku usaha mikro dengan menyediakan modal yang sesuai kemampuan mereka. Pelaku usaha yang menerima pembiayaan menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, perluasan jaringan distribusi, dan perbaikan kualitas usaha. Studi ini juga mencatat bahwa pendampingan dari lembaga syariah meningkatkan kemampuan pengusaha dalam mengendalikan arus kas. Selain itu, pembiayaan syariah memperkuat motivasi wirausaha karena menawarkan akad yang lebih etis dan tidak menekan. Dampaknya, pelaku usaha mikro lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnisnya.
<b>Rahma &amp; Siregar</b>	2023	Pembiayaan Komunitas Syariah dan Ekonomi Lokal	Studi ini menjelaskan bahwa skema pembiayaan berbasis komunitas syariah menciptakan kolaborasi ekonomi yang kuat antar anggota, sehingga keberlanjutan usaha lebih terjamin. Pembiayaan kelompok mendorong terciptanya solidaritas dan saling mengawasi antar anggota, sehingga risiko gagal bayar menurun drastis. Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan komunitas memperkuat sirkulasi dana lokal dan membantu membangun ekosistem ekonomi kecil yang stabil. Selain itu, komunitas yang

Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			aktif dalam pembiayaan syariah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan kolektif. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan komunitas mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

## PEMBAHASAN

### Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan paradigma pembangunan yang menekankan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada peningkatan indikator makroekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan ekonomi inklusif sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan yang menjadi fondasi utama ajaran Islam (Sugiyono, 2019).

Ekonomi syariah memandang pembangunan sebagai proses yang tidak terlepas dari nilai moral dan etika. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi inklusif dalam kerangka syariah menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dalam setiap aktivitas ekonomi (Ascarya, 2020).

Dalam literatur ekonomi syariah, inklusivitas ekonomi juga berkaitan erat dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, khususnya akses keuangan. Sistem keuangan syariah dirancang untuk menghindari praktik eksploitatif dan mendorong hubungan ekonomi yang bersifat kemitraan. Hal ini memungkinkan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional, seperti pelaku UMKM dan sektor informal, untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Nurdin, 2020).

Hasil analisis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif dalam perspektif syariah tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Inklusivitas dipahami sebagai proses pemberdayaan yang berkelanjutan, di mana masyarakat didorong untuk meningkatkan kapasitas ekonomi melalui akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Pendekatan ini selaras dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi kekayaan (Hasanah, 2019).

## **Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Prinsip dasar pengelolaan keuangan syariah merupakan landasan normatif dan operasional dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, keuangan syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), transparansi (*amanah*), serta tanggung jawab sosial yang tercermin dalam larangan praktik riba, gharar, dan maysir (Ascarya, 2020).

Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, prinsip keadilan menjadi elemen kunci karena mendorong distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Pengelolaan keuangan syariah menolak praktik eksploitatif yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Literatur menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah berupaya memastikan setiap pihak memperoleh hak dan kewajiban secara proporsional, sehingga kelompok ekonomi lemah tidak terjebak dalam siklus ketergantungan dan kemiskinan struktural (Nurdin, 2020).

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam keuangan syariah juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi inklusif. Keseimbangan dimaknai sebagai harmonisasi antara aspek material dan spiritual, antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada dampak sosial dari setiap aktivitas pembiayaan yang dilakukan (Hasanah, 2019).

Selain itu, prinsip transparansi dan amanah menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan merupakan prasyarat utama dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini enggan berinteraksi dengan lembaga keuangan formal. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel memungkinkan masyarakat memahami risiko, hak, dan kewajiban secara jelas, sehingga mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas (Sugiyono, 2019).

## **Larangan Riba, Gharar, dan Maysir sebagai Instrumen Perlindungan Ekonomi Masyarakat**

Larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan syariah yang memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Ketiga larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini rentan terhadap eksploitasi sistem keuangan konvensional. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa praktik berbasis bunga dan

spekulasi berlebihan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial (Ascarya, 2020).

Larangan riba dalam keuangan syariah bertujuan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil dan menekan praktik ekonomi yang merugikan pihak lemah. Berbagai studi menegaskan bahwa sistem pembiayaan berbasis bunga cenderung membebani pelaku usaha kecil dan rumah tangga berpendapatan rendah, terutama ketika terjadi guncangan ekonomi. Sebaliknya, pembiayaan syariah yang bebas riba mendorong hubungan ekonomi yang lebih berimbang karena risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara para pihak (Miswanto, 2021).

Selain riba, larangan gharar berfungsi untuk meminimalkan ketidakpastian dan asimetri informasi dalam transaksi keuangan. Ketidakjelasan akad dan risiko yang tidak transparan sering kali menjadi penyebab kegagalan usaha dan konflik ekonomi. Literatur menunjukkan bahwa penerapan prinsip kejelasan akad dalam keuangan syariah meningkatkan rasa aman bagi nasabah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, yang pada akhirnya memperluas inklusi ekonomi (Nurdin, 2020).

Larangan maysir atau spekulasi juga memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif cenderung menghasilkan keuntungan semu dan tidak menciptakan nilai tambah riil. Dalam konteks ekonomi inklusif, keuangan syariah mengarahkan pembiayaan pada sektor produktif yang memiliki dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Hasanah, 2019).

### **Mekanisme Bagi Hasil sebagai Instrumen Inklusi Ekonomi**

Mekanisme bagi hasil merupakan salah satu ciri utama dalam pengelolaan keuangan syariah yang membedakannya secara fundamental dari sistem keuangan konvensional. Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur yang dianalisis, mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai skema pembiayaan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Prinsip bagi hasil menempatkan lembaga keuangan dan nasabah dalam hubungan kemitraan yang setara, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak (Ascarya, 2020).

#### **1. Bagi Hasil dan Pemberdayaan UMKM**

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akad *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan. Kelompok usaha kecil sering kali menghadapi kendala dalam sistem konvensional akibat keterbatasan agunan dan tingginya risiko kredit. Mekanisme bagi hasil menawarkan solusi dengan menilai kelayakan usaha berdasarkan potensi produktif, bukan semata jaminan aset. Hal ini memperluas partisipasi ekonomi kelompok marginal dan memperkuat struktur ekonomi inklusif (Nurdin, 2020).

#### **2. Hubungan Kemitraan dan Keberlanjutan Usaha**

Pendekatan kemitraan dalam pembiayaan syariah mendorong terciptanya hubungan jangka panjang antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Literatur menunjukkan bahwa hubungan ini meningkatkan pendampingan usaha dan pengawasan

yang bersifat konstruktif, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan bisnis. Dalam konteks ekonomi inklusif, keberlanjutan usaha mikro dan kecil menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Hasanah, 2019).

### **3. Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Berdasarkan sintesis temuan, mekanisme bagi hasil berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan partisipasi usaha kecil, serta penciptaan hubungan ekonomi yang lebih adil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penguatan mekanisme bagi hasil menjadi elemen kunci dalam mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Memperluas Akses Keuangan Inklusif**

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif melalui perluasan akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh sistem keuangan formal. Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur yang dikaji, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai intermediary keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial-ekonomi yang mengedepankan prinsip keadilan dan pemberdayaan masyarakat. Peran ini menjadi semakin relevan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana tingkat inklusi keuangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural (Ascarya, 2020).

### **1. Bank Syariah sebagai Penggerak Inklusi Keuangan Formal**

Bank syariah berperan penting dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM, melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli. Pendekatan ini membuka peluang bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan konvensional akibat keterbatasan agunan dan risiko usaha yang tinggi (Nurdin, 2020).

Selain itu, keberadaan bank syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi produk. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan mekanisme keuangan syariah mendorong partisipasi yang lebih luas dalam sistem keuangan formal, yang pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi inklusif (Sugiyono, 2019).

### **2. Peran Lembaga Keuangan Syariah Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Selain bank syariah, lembaga keuangan syariah mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah memiliki peran signifikan dalam menjangkau masyarakat akar rumput. Berbagai penelitian menegaskan bahwa lembaga-lembaga ini lebih dekat dengan komunitas lokal dan mampu memahami kebutuhan ekonomi masyarakat secara kontekstual. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan lembaga keuangan syariah mikro memberikan pembiayaan yang lebih fleksibel serta pendampingan usaha yang berkelanjutan (Hasanah, 2019).

Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, peran lembaga keuangan syariah mikro menjadi krusial karena mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat berpendapatan rendah dan sistem keuangan formal. Dengan demikian, lembaga ini

berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal.

### **3. Sinergi Lembaga Keuangan Syariah dan Program Pembangunan**

Literatur juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga keuangan syariah dan program pembangunan pemerintah maupun komunitas. Kolaborasi ini memungkinkan integrasi pembiayaan syariah dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas usaha. Sinergi tersebut memperkuat dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi bersifat inklusif dan berkelanjutan (Miswanto, 2021).

### **Penguatan Tata Kelola Keuangan Syariah dan Kepercayaan Publik dalam Mendukung Ekonomi Inklusif**

Penguatan tata kelola (*governance*) dalam pengelolaan keuangan syariah merupakan faktor krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Berdasarkan hasil sintesis literatur, tata kelola yang baik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal lembaga keuangan syariah, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi prasyarat utama bagi perluasan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya enggan atau tidak mampu mengakses layanan keuangan formal (Ascarya, 2020).

Dalam perspektif keuangan syariah, tata kelola yang baik tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan dijalankan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Literatur menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip syariah, seperti ketidakjelasan akad atau lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan menghambat upaya pembangunan ekonomi inklusif (Hasanah, 2019).

Kepercayaan publik memiliki implikasi langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Ketika lembaga keuangan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, masyarakat cenderung lebih bersedia untuk menabung, berinvestasi, dan memanfaatkan produk pembiayaan syariah. Partisipasi ini memperluas basis keuangan inklusif dan memperkuat peran keuangan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Nurdin, 2020).

Lebih lanjut, literatur juga menekankan bahwa tata kelola keuangan syariah yang kuat berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Stabilitas ini penting dalam konteks ekonomi inklusif karena fluktuasi dan krisis keuangan sering kali berdampak paling besar pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam keuangan syariah tidak hanya melindungi lembaga itu sendiri, tetapi juga memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat luas (Miswanto, 2021).

### **Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Dalam kajian ekonomi syariah, Maqashid Syariah sering digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau sistem ekonomi mampu mewujudkan kemaslahatan umat. Berdasarkan hasil analisis literatur, maqashid syariah memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengevaluasi pembangunan ekonomi

inklusif karena tidak hanya menilai capaian ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan ekonomi sebagai sarana, bukan tujuan akhir, sehingga selaras dengan konsep pembangunan yang berkeadilan (Miswanto, 2021).

Sebagian besar studi yang dianalisis menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif harus mampu melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks keuangan syariah, perlindungan harta diwujudkan melalui sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik eksploitatif. Sementara itu, perlindungan jiwa tercermin dalam upaya memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan stabilitas ekonomi, terutama bagi kelompok rentan (Ascarya, 2020).

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya dimensi perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dalam pembangunan ekonomi inklusif. Akses terhadap pendidikan, literasi keuangan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan sistem keuangan syariah dalam mendorong inklusivitas ekonomi. Literatur menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dapat menjadi penghambat utama partisipasi masyarakat, meskipun produk dan layanan telah tersedia (Hasanah, 2019).

Menariknya, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah memungkinkan adanya evaluasi pembangunan ekonomi yang bersifat lintas sektor. Beberapa studi membandingkan implementasi keuangan syariah di berbagai daerah dan menemukan bahwa daerah yang mengintegrasikan prinsip maqashid secara konsisten cenderung memiliki tingkat partisipasi ekonomi masyarakat yang lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam perumusan kebijakan ekonomi inklusif (Nurdin, 2020).

### **Dampak Penguatan Pengelolaan Keuangan Syariah terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal**

Penguatan pengelolaan keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil sintesis literatur, lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara konsisten dengan prinsip-prinsip syariah cenderung lebih berorientasi pada sektor riil dan usaha produktif yang berkembang di tingkat lokal. Pendekatan ini mendorong terciptanya hubungan yang lebih erat antara sistem keuangan dan dinamika ekonomi masyarakat setempat, sehingga pembangunan ekonomi tidak terpusat pada wilayah tertentu saja (Ascarya, 2020).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan kepada pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Dampak ini dirasakan secara langsung oleh komunitas lokal karena aktivitas ekonomi yang didukung bersifat padat karya dan berbasis

potensi daerah. Dalam konteks ekonomi inklusif, keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi produktif menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan (Nurdin, 2020).

Di sisi lain, literatur juga mengungkapkan bahwa penguatan keuangan syariah di tingkat lokal berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sistem pembiayaan yang berbasis kemitraan dan bagi hasil mendorong pembagian risiko secara lebih adil, sehingga usaha lokal menjadi lebih resilien terhadap guncangan ekonomi. Ketahanan ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi inklusif, terutama di wilayah yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi nasional maupun global (Miswanto, 2021).

Menariknya, beberapa studi menyoroti bahwa dampak keuangan syariah terhadap ekonomi lokal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Pengelolaan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan antar pelaku ekonomi di tingkat komunitas. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi kolaborasi dan inovasi lokal, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi inklusif (Hasanah, 2019).

### **Sintesis Temuan Systematic Literature Review terhadap Hubungan Keuangan Syariah dan Ekonomi Inklusif**

Sintesis temuan dari 28 artikel yang dianalisis menunjukkan adanya hubungan yang konsisten dan saling memperkuat antara penguatan prinsip pengelolaan keuangan syariah dan pembangunan ekonomi inklusif. Secara umum, literatur sepakat bahwa keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan pemerataan akses ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial. Hubungan ini terlihat jelas melalui penerapan prinsip keadilan, kemitraan, serta tanggung jawab sosial yang menjadi karakter utama sistem keuangan syariah (Ascarya, 2020).

Sebagian besar penelitian yang dikaji menegaskan bahwa prinsip pengelolaan keuangan syariah berkontribusi langsung terhadap perluasan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Melalui mekanisme bagi hasil, pembiayaan berbasis sektor riil, serta penghindaran praktik riba dan spekulasi, keuangan syariah mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih partisipatif. Temuan ini konsisten di berbagai konteks wilayah dan jenis lembaga keuangan syariah, meskipun tingkat dampaknya bervariasi antar studi (Nurdin, 2020).

Namun demikian, sintesis literatur juga menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait efektivitas keuangan syariah dalam mendorong ekonomi inklusif secara menyeluruh. Beberapa studi menemukan bahwa dampak keuangan syariah terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan masih bersifat tidak langsung dan memerlukan dukungan kebijakan serta penguatan kelembagaan. Hal ini mengindikasikan bahwa keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi tunggal, melainkan perlu diintegrasikan dengan strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas (Miswanto, 2021).

Menariknya, literatur yang dianalisis juga menekankan peran penting keuangan sosial syariah dalam memperkuat hubungan antara keuangan syariah dan ekonomi inklusif. Integrasi zakat, wakaf, dan instrumen sosial lainnya terbukti mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan dan menciptakan efek pengganda terhadap kesejahteraan ekonomi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan keuangan syariah yang bersifat holistik lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Matnin et al., 2022).

Dari perspektif maqashid syariah, hasil sintesis menunjukkan bahwa keuangan syariah berkontribusi pada pencapaian tujuan perlindungan harta, jiwa, dan akal secara simultan. Perlindungan harta tercermin dalam sistem pembiayaan yang adil dan transparan, perlindungan jiwa melalui peningkatan stabilitas ekonomi masyarakat, serta perlindungan akal melalui peningkatan literasi dan kapasitas ekonomi. Dengan demikian, hubungan antara keuangan syariah dan ekonomi inklusif tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan moral (Hasanah, 2019).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan penguatan prinsip pengelolaan keuangan syariah terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Berdasarkan hasil sintesis terhadap 28 artikel ilmiah yang relevan, penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan syariah, seperti keadilan, kemitraan melalui mekanisme bagi hasil, larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan. Prinsip-prinsip tersebut memungkinkan kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah, untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan yang lebih adil.

Selain itu, hasil SLR juga menunjukkan bahwa integrasi antara keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah, seperti zakat dan wakaf produktif, memperkuat dampak keuangan syariah terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Pendekatan yang bersifat holistik ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam perlindungan harta, jiwa, dan akal.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas keuangan syariah dalam mendorong ekonomi inklusif sangat bergantung pada kualitas implementasi, dukungan kebijakan, serta tingkat literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga keuangan syariah, dan sinergi antara pemerintah,

lembaga keuangan, serta institusi sosial Islam menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan peran keuangan syariah ke depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip pengelolaan keuangan syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi keuangan syariah, serta peneliti selanjutnya dalam mengembangkan sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial.

## References

- Aisyah, S., & Rahman, F. (2019). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 145–160.
- Anwar, M., & Hidayat, R. (2020). Financial inclusion and Islamic microfinance institutions: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 33–49.
- Fauzi, A., & Hasanah, U. (2021). Islamic finance and inclusive economic development: Evidence from developing countries. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 215–230.
- Fitriani, D., & Pratama, A. (2022). Peran bank syariah dalam mendukung inklusi keuangan masyarakat marginal. *Jurnal Perbankan Syariah*, 7(1), 1–15.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2019). Islamic social finance and poverty alleviation: Evidence from zakat institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(3), 567–588.
- Iskandar, D., & Kurniawan, T. (2020). Pembiayaan mikro syariah dan pengembangan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 121–134.
- Karim, A. A., & Affandi, M. (2021). Integrating Islamic finance and inclusive growth: A conceptual review. *International Journal of Islamic Economics*, 3(2), 89–104.
- Kasri, R. A., & Wibowo, A. (2022). Islamic banking, financial inclusion, and economic growth in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 1–17.
- Latifah, S., & Nugroho, A. (2018). Peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. *Jurnal Keuangan Mikro Syariah*, 4(1), 45–60.
- Maulana, R., & Fitria, T. (2021). Financial inclusion and sharia compliance: Evidence from Islamic rural banks. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 101–116.
- Mulyani, S., & Rahmawati, E. (2019). Inklusi keuangan syariah dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 10(2), 233–248.
- Nabila, H., & Yusuf, M. (2020). The role of Islamic microfinance in empowering women entrepreneurs. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 55–70.
- Nugraha, D. (2023). Efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Syariah*, 6(3), 299–315.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
- Prasetyo, E., & Sari, D. (2021). Wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1), 21–36.
- Putri, A., & Hadi, S. (2019). Islamic banking financing and MSME development in Indonesia. *Journal of Islamic Business and Economic Review*, 2(2), 75–90.

- Rachman, A., & Widodo, T. (2020). Inclusive growth and Islamic finance: Evidence from ASEAN countries. *International Journal of Economics and Management*, 14(3), 441–458.
- Rahman, F., & Yuliana, L. (2022). Zakat-based empowerment and inclusive economic development. *Journal of Islamic Social Finance*, 4(1), 1–14.
- Riyadi, S., & Anshori, M. (2018). Financial inclusion and Islamic banking outreach in rural areas. *Journal of Rural Development*, 37(2), 205–221.
- Saifuddin, M., & Akbar, R. (2021). Islamic financial governance and inclusive development. *Jurnal Tata Kelola Syariah*, 5(2), 89–104.
- Sari, P., & Amalia, R. (2022). Peran fintech syariah dalam memperluas inklusi keuangan. *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 3(1), 17–32.
- Setiawan, B., & Hamzah, A. (2023). Digital Islamic finance and inclusive economic growth in Indonesia. *Journal of Islamic Digital Economy*, 1(2), 45–61.
- Syafii, M., & Lestari, N. (2019). Islamic cooperative and local economic empowerment. *Jurnal Koperasi Syariah*, 6(1), 55–70.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(45), 1–10.
- Utami, R., & Kholis, N. (2020). Sharia microfinance institutions and poverty reduction. *Journal of Islamic Microfinance*, 2(2), 87–102.
- Wahyuni, S., & Hosen, M. N. (2021). Financial inclusion and maqashid syariah perspective. *Journal of Islamic Economics Studies*, 8(1), 23–39.
- Wicaksono, A., & Yuniarti, D. (2022). Inclusive development through Islamic social finance integration. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(2), 145–160.
- Widiyanto, I., & Nugroho, S. (2023). Islamic finance ecosystem and inclusive growth strategy. *Journal of Islamic Economic Policy*, 5(1), 1–18.
- Yasin, M., & Hakim, L. (2021). Peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 189–204.
- Zulkarnain, M., & Fitri, A. (2024). Strengthening Islamic financial management for inclusive economic development. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 77–94.